



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ASIS HIDAYANTI
NIK : 3276037006670002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 18 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASIS HIDAYANTI
2. Jabatan : PANITERA PENGANTI
3. NHK : 443765

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 195.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/190 m2 di NEGARA
[unknown], Rp. 195.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.000.000

1. MOBIL, SUZUKU APV ARENA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N42LOA/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA NC12AF2CB1AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 16.674.249

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 338.624.249

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 338.624.249

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.